

ANALISIS SISTEM INFORMASI KEUANGAN REGIONAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI UNTUK UNIT KERJA DAERAH BANDUNG

THE ANALYSIS OF REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM IN IMPROVING THE INFORMATION QUALITY FOR REGIONAL WORK UNIT OF BANDUNG

Nurul Amalia Ramdan

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Padjajaran
amaliaaramdan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), (2) kualitas informasi (3) pengaruh tingkat implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kualitas informasi untuk Daerah Unit Kerja Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang disampaikan adalah metode survei. Data aplikasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas informasi adalah data primer yang berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada 23 responden dengan melibatkan Dinas dan Dinas Kota Bandung. Hasil data menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Satuan Kerja Daerah Kota Bandung telah berjalan dengan baik, termasuk dalam kategori tingkat tinggi. Sementara itu, kualitas informasi pada Satuan Kerja Daerah Kota Bandung, termasuk dalam kategori nilai tengah. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdampak positif terhadap kualitas informasi di Satuan Kerja Daerah Kota Bandung sebesar 38,81% dan sisanya 61,19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam hasil ini.

Kata kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kualitas Informasi, Sistem Informasi.

ABSTRACT

This study are aimed at determining (1) the implementation of Region Finance Information System (SIKD), (2) the information quality (3) the influence degree of the implementation of the Region Finance Information System (SIKD) on the information quality for Regional Work Unit of Bandung. Research method used is a descriptive method. The data collection technique conveyed is a survey method. Data of the application region finance information system in increasing the information quality is a data primer which derives from questionnaires distributed to 23 respondents by involving the Agency and the Department of Bandung. The results data showed that the implementation of Region Finance Information System (SIKD) in Regional Work Unit of Bandung has been running well, included in the high rate category. Meanwhile, the information quality on Regional Work Unit of Bandung, included in the middle rate category. The implementation of Region Finance Information System (SIKD) has a positive impact for the information quality in Regional Work Unit of Bandung by 38,81% and the balance of 61,19% influenced by other factors not examined in this results.

Keywords: Region Finance Information System, Information Quality, Information System.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan

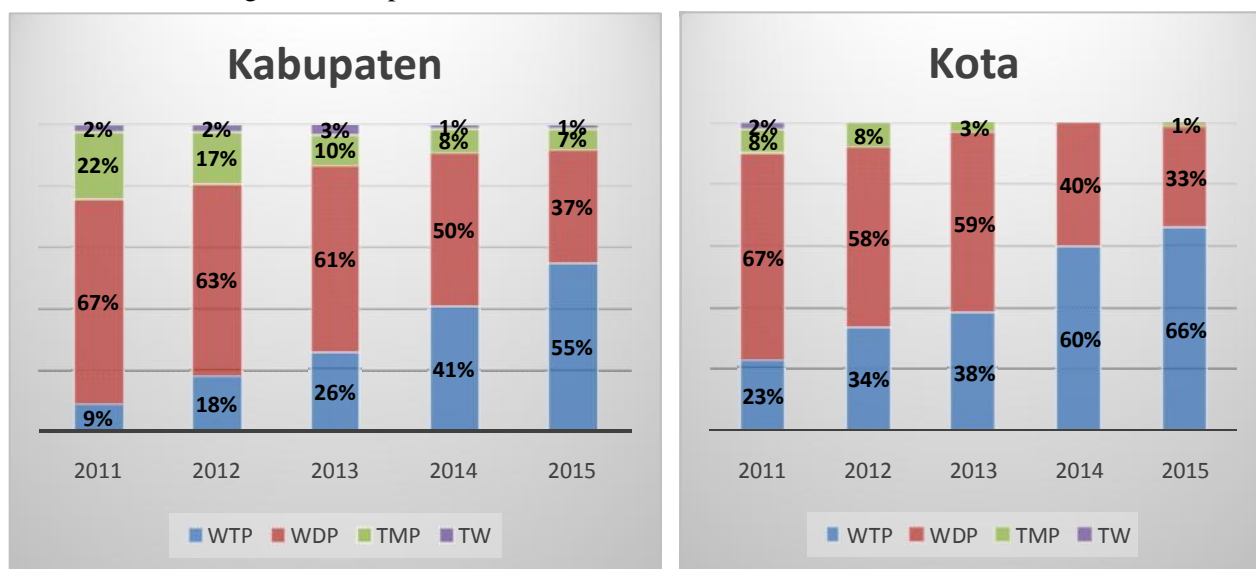
keterbukaan informasi publik, elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh

informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melihat peran informasi yang begitu penting maka informasi yang disajikan diharapkan dapat berkualitas, sehingga mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mendukung terwujudnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Indonesia memiliki lembaga negara yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaankinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menurut (Ulum, 2009) “Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas

laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah”. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BPK mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut dapat dilihat dalam perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemerintahan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pada grafik 1.1 sebagai berikut :



Sumber :Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2016 (data diolah)

Gambar 1.1
Opini LKPD Tahun 2011-2015
Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat kenaikan opini dari tahun sebelumnya yang terjadi pada seluruh level pemerintahan. Pada Pemerintah Provinsi, opini WTP mengalami peningkatan sebesar 9%. Begitupula untuk Pemerintah Kabupaten yang mengalami peningkatan sebesar 9% dan juga pada Pemerintah Kota yang mengalami peningkatan sebesar 6%. Opini WTP merupakanopininimutlak yang seharusnya diperoleh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yuddy Chrisnan diMenteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa “Opini WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN sebagai entitas pengelola keuangan negara. Meskipun opini terbaik, perolehan WTP itu bukanlah prestasi, melainkan kewajiban.” (www.kemendagri.go.id). Pemerintah Daerah melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mampu memperoleh opini WTP, namun berdasarkan data laporan IHPS I BPK Tahun 2016 untuk opini

LKPD Tahun 2015 berdasarkan tingkat Pemerintahan Kota masih terdapat Kota yang memperoleh opini selain WTP sebanyak 34% atau 31 Kota dan salah satunya adalah Kota Bandung.

Berikut table opini audit yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung selama 10 Tahun terakhir :

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD kota Bandung Tahun 2006 – 2015

No	Tahun	Opini BPK
1	2006	WDP
2	2007	WDP
3	2008	WDP
4	2009	TMP (<i>disclaimer</i>)
5	2010	WDP
6	2011	WDP
7	2012	WDP
8	2013	WDP
9	2014	WDP
10	2015	WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2016 (data diolah)

Berdasarkan data laporan IHPS I BPK Tahun 2016 untuk opini audit Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung Tahun 2006-2015 dalam tabel 1.1, terlihat jelas bahwa opini yang diperoleh pada Tahun 2006 hingga Tahun 2008 Kota Bandung adalah Wajar Dengan Pengecualian, Tahun 2009 Kota Bandung memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer* dan tahun selanjutnya Tahun 2010 hingga Tahun 2015 Kota Bandung mengalami perbaikan dengan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian namun masih belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut masih dalam kategori wajar dengan pengecualian, bahkan pada Tahun 2009 pemerintah daerah Kota Bandung mendapat opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*), hal tersebut mencerminkan bahwa informasi yang dihasilkan belum berkualitas. Informasi yang dihasilkan belum berkualitas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah belum berjalan dengan baik. Bila hal tersebut

dibiarkan, maka dampak yang dapat terjadi adalah tingkat kepercayaan public terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan public akan menurun dan apabila dibiarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Terkait dengan penyajian informasi yang berkualitas, semenjak Tahun 2009 Kota Bandung mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang handal dan terkini, dengan menerapkan sebuah program aplikasi keuangan yaitu system informasi manajemen daerah (SIMDA) guna melaksanakan (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 2005). Sistem informasi manajemen daerah merupakan hibah yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk mendukung capaian indicator kinerja meningkatnya tingkat Opini BPK terhadap LKPD. Adapun inti dari program aplikasi keuangan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*), yaitu penerapan system pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan kualitas informasi tersebut idealnya dilaksanakan melalui optimalisasi penerapan system informasi keuangan daerah, karena informasi merupakan hasil keluaran dari system informasi, dimana akan menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas apabila dapat dikelola dengan baik oleh system informasi keuangan daerah, sesuai pendapat yang dikemukakan oleh (Susanto, 2008) sebagai berikut “Melihat peran informasi yang begitu tinggi bagi organisasi, maka organisasi menjadi sangat bergantung kepada system informasi dan mereka memperlakukan informasi sebagai sumberdaya yang sangat berharga dalam menghindari risiko sehingga turut menentukan dapat tidaknya suatu organisasi terus beroperasi”.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik menganalisis penerapan system informasi akuntansi pada bidang sector public yaitu system informasi keuangan daerah yang mulai diterapkan pada Tahun 2009.

KAJIAN TEORI

Sistem Informasi

Keberadaan Sistem Informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Sistem Informasi mengolah data sebagai masukan yang nantinya diproses oleh system untuk menghasilkan keluaran berupa informasi. Menurut (Susanto, 2008) system informasi adalah “Kumpulan dari sub-sub system baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.”

Sistem informasi menurut Laudon (dalam Susanto, 2008) yaitu “Komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, informasi untuk mendukung pengambilan keputusan koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.” Sistem informasi menurut (Krismiaji, 2015) adalah “Cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan data dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Komponen-Komponen Sistem Informasi

Komponen system informasi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi membentuk sebuah sistem. Menurut (Mulyanto, 2009) “system informasi terdiri dari lima sumberdaya yang dikenal sebagai komponen system informasi, kelima komponen tersebut adalah manusia, *hardware*, *software*, data dan jaringan”. Komponen yang menyusun system informasi menurut (Susanto, 2008) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat Lunak atau *software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Tanpa *software* computer tidak dapat melaksanakan fungsinya.

Software dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perangkat lunak system (*system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*application software*).

3. Manusia (*Brainware*)

Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komposisi informasi dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai system informasi akuntansi. Komponen SDM ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya didalam suatu system informasi sebagai hasil dari perencanaan, analisis, perancangan dan strategi implementasi yang didasarkan kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia (SDM) system informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan system informasi pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh system informasi tersebut. Beberapa kelompok SDM suatu organisasi yang terlibat dalam beberapa aktivitas diatas, secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam pemilik dan pemakai system informasi.

4. Prosedur (*Procedure*)

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, tanpa prosedur yang benar system informasi secepat apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur telah diterima oleh pemakai sistem informasi maka prosedur akan menjadi pedoman bagaimana fungsi system informasi tersebut harus dioperasikan. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut karena itu aktivitas merupakan fungsi dari system informasi.

5. Basis Data (*Database*)

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan didalam media penyimpanan di suatu perusahaan (artiluas) atau di dalam komputer (artisempit).

6. Teknologi Jaringan Komunikasi (*Communication Network Technology*)

Jaringan telekomunikasi saat ini menghubungkan daratan dan lautan untuk memindahkan data dalam jumlah besar. Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi kesatu atau beberapa lokasi lain yang berbeda.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah secara nasional yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

SIKD sebagai sebuah sistem juga melakukan pengelolaan keuangan daerah, dalam setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 2005) menyatakan bahwa system informasi keuangan daerah adalah

Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD pada masing-masing daerah yang nantinya akan dirangkum dalam SIKD nasional. Sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 9, pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pengendalian deficit anggaran.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah dan defisi tanggangan daerah.

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 2 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah.
2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat.
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyaji an Informasi.
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD.
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD.
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi.
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

Tujuan dari Penyelenggaraan SIKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana diungkapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 12 adalah sebagai berikut:

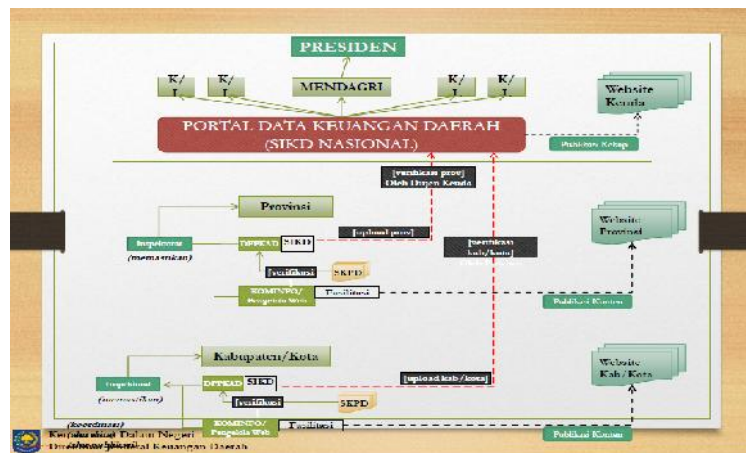
1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah.
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah.
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat.
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan

SIKD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 13 meliputi:

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh system informasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
3. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 pasal 13 Alur penyelenggaraan SIKD berdasarkan tingkat Pemerintahan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Sumber : www.kemendagri.go.id

Gambar 1.2
Alur Penyelenggaraan SIKD
Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat penyajian informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SKPD tingkat Kabupaten/Kota diverifikasi terlebih dahulu sebelum di upload oleh DPPKAD kedalam SIKD nasional dan dipublikasikan pada website Kota/Kabupaten. Begitupun alur penyajian informasi keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SKPD tingkat Provinsi. Setelah seluruh Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, maka akan direkap untuk dipublikasikan

pada website Keuangan Daerah dan dilaporkan pada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis sehingga dapat membantu Kementrian dan Presiden dalam merumuskan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional.

Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu plikasi yang diharapkan dapat membantu kinerja Pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan. Kepala Daerah beserta jajarannya mengemban amanah untuk bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta data-data yang

mendukungnya dengan mengolah sumber daya input diolah menjadi output melalui suatu proses transformasi dengan mekanisme yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Informasi Keuangan Daerah (IKD)

Menurut (Krisniaji, 2015) mengungkapkan bahwa “Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.” Adapun Informasi menurut (Mulyanto, 2009) “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.” Informasi keuangan adalah instrument untuk melaksanakan akuntabilitas pemerintah daerah secara efektif kepada masyarakat, karena melalui laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat melacak dari mana sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang menerima manfaat, sertadengan cara apa pemerintah daerah menutup belanja, dalam hal terjadi defisit dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus. (Chabib, 2011)

Informasi Keuangan Daerah (IKD) menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), 2005) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3 Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kualitas Informasi

Menurut (Jogiyanto, 2008) mengungkapkan bahwa “Kualitas informasi adalah mengukur kualitas keluaran dari system informasi”. Adapun kualitas informasi menurut (Susanto, 2008) adalah “Kualitas informasi adalah kesesuaian antara spesifikasi informasi yang dibutuhkan dibandingkan dengan spesifikasi informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.”

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bias dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalam dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

METODE PENELITIAN

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, diantaranya 1) Variabel terikat/ bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi (Y); 2) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (X).

- Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem informasi keuangandaerah. Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadiin formasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Terdapat enam dimensi system informasi keuangan daerah, yaitu: 1) Perangkat keras; 2) Perangkat lunak; 3) Manusia; 4) Prosedur; 5) Basis data; 6) Teknologi jaringan komunikasi (Susanto, 2008).

- Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas informasi. Kualitas informasi adalah kesesuaian antara spesifikasi informasi yang dibutuhkan dibandingkan dengan spesifikasi informasi yang dihasilkan. Terdapat empat dimensi kualitas informasi, yaitu: 1) Relevan; 2) Dapat Dipercaya (Andal); 3) Dapat Dibandingkan; 4) Dapat Dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah pada Kota Bandung, yaitu sebanyak 72 Perangkat Daerah sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, 2016) sebagai populasi dalam penelitian ini, sedangkan penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik pengumpulan sampel adalah *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Menerapkan system informasi keuangan daerah.
2. Merupakan unsure pelaksana dan penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kota Bandung.

Maka sampel dalam penelitian ini dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik adalah Badan dan Dinas Kota Bandung, yaitu sebanyak 23 Badan/ Dinas dengan responden admin system informasi keuangan daerah subag keuangan pada masing-masing perangkat daerah di Wilayah Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2016) Teknik pengumpulan data didasarkan pada jenis data yang dipergunakan dalam penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Kuesioner/ Angket

Jenis kuesioner yang digunakan penulis adalah kuesioner tertutup dan terstruktur, artinya pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka karena jawabannya telah disediakan. Responden mengisi secara langsung dengan member tanda pada jawaban yang telah disediakan. Dalam penelitian kuesioner yang diberikan kepada admin system informasi keuangan daerah subag keuangan pada masing-masing perangkat daerah berbentuk badan dan dinas Kota Bandung.

Pengumpulan data berisi instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengkuantitatifkan jawaban yang dipilih dalam kuesioner. Dalam penelitian ini akan digunakan berupa skala numerikal. Menurut (Jogiyanto, 2008) bahwa “skala numerikal (*numerical scale*) mirip dengan skala perbedaan semantik, hanya mengganti ruang semantik yang disediakan dengan angka – angka numerik (misalnya 1 sampai dengan 5 untuk 5 poin skala Likert atau 1 sampai dengan 7 untuk 7 poin skala Likert)”.

2. Uji Instrumen Penelitian

Untuk menghasilkan data yang berkualitas tentunya diperlukan instrument penelitian yang berkualitas juga, sehingga didapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan realitanya. Untuk itu dilakukan beberapa uji instrument penelitian sebagai berikut :

a. Mencari varian tiap butir soal

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

(Umar, 2007)

Keterangan:

σ^2 = Harga varian setiap butir soal

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item

($\sum X$) = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item

N = Jumlah Responden

Mencari varian total

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}}{n}$$

(Umar, 2007)

Keterangan:

- t_i^2 = Harga varian stiap butir soal
- Y^2 = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item
- $(\sum Y)^2$ = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item
- N = Jumlah Responden

Hasil dari varian tiap butir soal dan varian total dimasukan kedalam rumus *cronbach's alpha*. Setelah diperoleh hasil r_{11} selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan = 0.05.

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data dinyatakan reliabel

Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka data dinyatakan tidak reliabel

2.1 Uji Validitas

Menurut (Umar, 2007) "Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan - pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/ diganti karena dianggap tidak valid." Sebuah instrument dikatakan valid apabila instrumen itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur, jika sebuah instrumen benar dan valid, maka data yang dihasilkan juga valid. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Umar, 2007)

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien validitas
- N = Banyaknya subjek
- X = Nilai pembanding
- Y = Nilai dari instrument yang akan dicari validitasnya

Koefisien korelasi (r), yang didapat dengan taraf signifikansi 5 %, kemudian di dapat nilai r_{hitung} yang kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} .

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dalam instrument tersebut valid

Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item pertanyaan dalam instrument tersebut tidak valid.

Teknik Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2016) Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta - fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan distribusi data dari variabel yang diteliti dan sekaligus mengukur sejauh mana penerapan system informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas informasi pada Perangkat Daerah Kota Bandung sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

2. Korelasi Product Moment

Korelasi *Product Moment* sangat populer dan sering dipakai untuk penelitian. Korelasi ini dikemukakan oleh Karl Pearson pada tahun 1900. Korelasi *Product Moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variable bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Tujuan dari analisis korelasi adalah menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel.

Teknik analisis Korelasi *Product Moment* termasuk teknik statistic parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan menggunakan syarat tertentu. Rumus yang digunakan Korelasi *Product Moment*:

$$r_{hitung} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2016)

Keterangan:

- r_{hitung} = nilai korelasi *Product Moment*
- n = jumlah responden
- X = jumlah skor variabel X
- Y = jumlah skor total (seluruh item)

Korelasi *Product Moment* dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 r +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat.

3. Koefisien Determinasi

Menurut (Purwanto & Suharyadi, 2009) “koefisien determinasi adalah kemampuan variable X (variable independen) mempengaruhi variabel Y (variable dependen)”. Besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Riduwan, 2009)

Keterangan:

KP = Nilai Koefisien Determinan

r = Nilai Koefisien Korelasi

4. Pengujian Hipotesis

Menurut (Purwanto & Suharyadi, 2009) pengujian hipotesis adalah “prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak”. Untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh positif antara penerapan system informasi keuangan daerah (variabel X) dalam meningkatkan kualitas informasi (variabel Y), maka digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : = 0, Penerapan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi.

H_1 : > 0, Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi.

Pengujian signifikansi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna generalisasi dari hubungan variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi *Product Moment* tersebut diuji dengan Uji Signifikansi (Uji t) dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2010)

Keterangan :

r = nilai Koefisien Korelasi

n = jumlah responden

Selanjutnya t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan t_{tabel} dengan $dk = n - 2$ dengan taraf signifikansi yang digunakan = 0,05. Adapun criteria keputusan uji t sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis nol H_0 ditolak dan hipotesis H_1 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis nol H_0 diterima dan hipotesis H_1 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) merupakan suatu aplikasi yang diharapkan dapat membantu kinerja Pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah dideskripsikan berdasarkan data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil tabulas jawaban responden mengenai penerapan system informasi keuangan daerah, berikut ini adalah distribusi frekuensi penerapan system informasi keuangan daerah :

Tabel 1.2

Distribusi Frekuensi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	31 – 45	3	13,04%
Sedang	46 – 60	8	34,78%
Tinggi	61 – 75	12	52,17%
Jumlah		23	100%

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dari jawaban yang diberikan responden diketahui bahwa secara keseluruhan penerapan system informasi keuangan daerah pada Perangkat Kota Bandung berada dalam kategori baik, karena jumlah responden yang memiliki persepsi pada kriteria tinggi yaitu sebanyak 12 orang atau 52,17% dan kriteria sedang sebanyak 8 orang atau 34,78% cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah responden yang memiliki persepsi pada kriteria rendah yaitu sebanyak 3 orang atau 13,04%.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan system informasi keuangan daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik karena sebagian besar komponen-komponen system informasi keuangan daerah sudah berjalan secara optimal dan saling terintegrasi untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas, karena system informasi itu sendiri terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuannya itu mengolah data menjadi informasi yang berguna, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Laudon dalam (Susanto, 2008) yaitu “Komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, informasi untuk mendukung pengambilan keputusan koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.”

Diantara dimensi yang menunjang penerapan system informasi keuangan daerah, perangkat keras (*hardware*), basis data dan teknologi jaringan komunikasi sudah berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa

ketiga dimensi tersebut sudah tersedia atau terlaksana dengan baik, dibandingkan dengan dimensi lainnya seperti perangkat lunak (*software*) dan prosedur (*procedur*) yang masih berada dalam kategori cukup baik, bahkan untuk dimensi manusia (*brainware*) masih berada dalam kategori kurang baik selaku pengelola system informasi keuangan daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung, sumber daya manusia (*brainware*) merupakan komponen yang tidak dapat dilepaskan dari sistem informasi, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh (Susanto, 2013) “sejalan dengan persepsi kita bahwa *brainware* atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari sistem informasi (SI)” sehingga perlu ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi bersama dengan komponen-komponen lainnya yang belum optimal karena akan mempengaruhi keluaran (output) yang dihasilkan.

Analisis Kualitas Informasi pada Perangkat Daerah Kota Bandung

Kualitas informasi adalah kesesuaian antara spesifikasi informasi yang dibutuhkan dibandingkan dengan spesifikasi informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi keuangan daerah merupakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi dideskripsikan berdasarkan data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Secara umum, gambaran mengenai kualitas informasi pada Perangkat Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.3
Distribusi Frekuensi Kualitas Informasi

Kriteria	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	20 – 23	4	17,39%
Sedang	34 – 47	14	60,87%
Tinggi	48 – 61	5	21,74%
Jumlah		23	100%

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 1.3 dari jawaban yang diberikan responden diketahui bahwa secara keseluruhan kualitas informasi pada Perangkat Kota Bandung berada dalam kategori cukup baik, karena jumlah responden yang memiliki persepsi pada kriteria sedang yaitu sebanyak 14 orang atau

60,87% dan kriteria tinggi sebanyak 5 orang atau 21,74% cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah responden yang memiliki persepsi pada kriteria rendah yaitu sebanyak 4 orang atau 17,39%.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung cukup memenuhi karakteristik kualitatif laporan. Namun perlu ditingkatkan lagi sehingga memenuhi seluruh karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) karena dengan informasi keuangan daerah yang baik adalah informasi yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna informasi keuangan daerah diantaranya adalah badan legislatif (DPRD), pemerintah pusat, masyarakat, investor, para analisis ekonomi dan keuangan serta pihak lainnya. Selain itu juga informasi keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan kondisi keuangan instansi pemerintahan yang bersangkutan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) sesuai dengan yang paparkan oleh (Chabib, 2011) :

Melalui laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat dapat melacak dari mana sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan berapa banyak, untuk apa dana masyarakat yang telah dikumpulkan itu dibelanjakan dan siapa yang menerima manfaat, serta dengan cara apa

pemerintah daerah menutup belanja, dalam hal terjadi defisit dan dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus.

Diantara dimensi yang mendukung kualitas informasi, yaitu relevan, andal dan dapat dipahami masih berada dalam kategori cukup baik, bahkan untuk dimensi dapat dibandingkan masih berada dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung belum sesuai dengan karakteristik kualitatif, sehingga aspek dapat dibandingkan dengan aspek lainya seperti relevan, andal dan dapat dipahami perlu ditingkatkan lagi, dengan begitu informasi yang dihasilkan dapat membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah serta informasi yang dihasilkan dapat mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam sistem informasi keuangan daerah secara nasional.

Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment (r)

Berikut hasil pengolahan data dari analisis koefisien korelasi *Pearson Product Moment* :

Tabel 1.4
Analisis Korelasi Pearson Product Moment
Correlations

		SIKD	Kualitas Informasi
SIKD	Pearson Correlation	1	.623**
	Sig. (1-tailed)		.001
	N	23	23
Kualitas Informasi	Pearson Correlation	.623**	1
	Sig. (1-tailed)	.001	
	N	23	23

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara system informasi keuangan daerah (X) dengan Kualitas Informasi (Y) adalah sebesar 0,623. Hal ini berarti hubungan antara system informasi keuangan daerah sebagai variabel independen (bebas) dan kualitas informasi sebagai dependen (terikat) termasuk dalam kriteria kuat. Hasil koefisien korelasi

tersebut menunjukkan nilai yang positif, yang artinya jika meningkatkan system informasi keuangan daerah meningkat maka kualitas informasi pun akan ikut meningkat, sebaliknya ketika system informasi keuangan daerah mengalami penurunan maka kualitas informasi pun akan ikut menurun.

Analisis Koefisien Determinasi (KD)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis koefisien determinasi tersebut menghasilkan angka 38,81% yang memiliki arti bahwa penerapan system informasi keuangan daerah sebagai variable independen (bebas) memiliki pengaruh 38,81 % terhadap kualitas informasi sebagai variabel dependen (terikat). Sisanya sebesar 61,19%, kualitas informasi dipengaruhi oleh berbagai factor selain oleh penerapan system informasi keuangan daerah.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 3,694, sedangkan untuk nilai t_{table} dapat diketahui dengan cara melihat table distribusi t dengan tingkat kesalahan α sebesar 0,05 dan $dk = n-2$ ($23-2=21$) maka diperoleh t_{table} sebesar 1,721. Setelah dibandingkan, ternyata nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,694 > 1,721$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sesuai dengan kriteria uji yang telah ditentukan sebelumnya, maka jika H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya penerapan sistem

Informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi. berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korelasi *pearson product moment* penerapan system informasi keuangan daerah (X) terhadap kualitas informasi (Y) signifikan karena $t_{hitung} > t_{table}$ yaitu $3,694 > 1,721$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi, artinya jika penerapan system informasi keuangan daerah meningkat maka kualitas informasi pun akan mengalami peningkatan, sebaliknya ketika penerapan sistem informasi keuangan daerah menurun maka kualitas informasi pun akan menurun.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhidayat (2012) yaitu jika penerapan sistem informasi keuangan daerah semakin membaik maka akan menyebabkan semakin membaiknya kualitas laporan keuangan. Selain itu, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maha putra dkk (2014) bahwa pemanfaatan system informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Perangkat Daerah di Kota Bandung menerapkan system informasi keuangan daerah secara optimal.
2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kualitas informasi pada Perangkat Daerah di Kota Bandung memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.
3. Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pada Perangkat Daerah Kota Bandung. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika penerapan system informasi keuangan daerah meningkat maka kualitas informasi juga akan meningkat.

Saran

Setelah didapat simpulan dari hasil penelitian, berikut beberapa saran yang peneliti ajukan bagi beberapa pihak yang terkait:

1. Bagi Perangkat Daerah Kota Bandung Perangkat Daerah Kota Bandung perlu meningkatkan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu system computer sehingga aplikasi keuangan dapat terintegrasi dengan fasilitas aplikasi perangkat lunak lainnya. Perangkat Daerah Kota Bandung seharusnya menempatkan karyawannya sesuai dengan bidang pendidikan yang mereka kuasai, lalu Perangkat Daerah Kota Bandung perlu meningkatkan lagi sumber daya manusia (*brainware*) dengan menambah pengalaman kerja seperti diadakanya pelatihan atau seminar yang dilaksanakan secara rutin. Selain itu modul yang diberikan kepada admin sistem informasi keuangan daerah harus lebih mudah dipahami agar pengguna (admin) sistem informasi keuangan daerah tidak merasa kesulitan sehingga akan meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung. Perangkat Daerah Kota Bandung perlu meningkatkan penerapan prosedur (*procedur*) mulai dari tahapan

penganggaran, lalu penata usahaan, setelah itu pelaporan.

Informasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung perlu di tingkatkan lagi, dengan mengoreksi ekpektasi para pengguna di masa lalu (*feedback value*), penyajian tepat waktu dan lengkap. Selain itu Informasi perlu ditingkatkan lagi dengan menyesuaikan semua pencatatan atas pengeluaran/ belanja dengan jumlah uang yang digunakan didukung bukti transaksi dan informasi yang disajikan menggambarkan setiap fakta yang ada dan selalubersifatnetral. Informasi keuangan yang dihasilkan harus konsistensi menyajikan dan mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dan identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi keuangan dan kinerja dalam suatu organisasi. Selain itu informasi keuangan yang dihasilkan harus mudah dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Bagi Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah Subag Keuangan
Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah Subag Keuangan diharapkan mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung itu sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak luar agar menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai Admin Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa, disarankan agar memperdalam dan memperkuat hasil penelitian tentang pengaruh system informasi keuangan daerah yang berkaitan dengan kualitas informasi, serta menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar dan menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib, S. & S. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Jogiyanto, H. M. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Putaka Belajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. , (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). , (2005).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , (2010).
- Purwanto & Suharyadi. (2009). *Statistika Untuk ekonomi dan keuangan modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. (2009). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi; Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar, H. (2007). *Desain Penelitian MSDM*

dan Perilaku Karyawan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. , (2004).